

KUMPULAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Media Indonesia Tanggal : 13 Januari 2011

Subyek : Ekologi Hal : 14

Bisnis Ekologis kian Ancam Lingkungan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memprediksi kerusakan lingkungan di Indonesia pada 2011 akan meningkat 50%-70% ketimbang tahun lalu. Penyebab utamanya adalah bisnis ekologis atau bisnis di bidang pengelolaan sumber daya alam. "Kerusakan terbesar disebabkan pertambangan dan perkebunan," kata Kepala Departemen Advokasi Walhi Mukri Friatna dalam acara Enviromental Outlook 2011 di Jakarta, kemarin.

Bisnis ekologis, imbuhnya, juga bakal memicu konflik dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Sepanjang 2011, konflik HAM diperkirakan akan meningkat di 11 provinsi. "Salah satunya dipicu penentuan kawasan REDD+ (reducing of emissions from deforestation and forest degradation). Provinsi itu adalah Aceh, Jambi, Riau, Sumatra Selatan, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan barat, Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Tengah." Ancaman tersebut diperkuat Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Nurkholis, Ia menjelaskan, konflik terkait dengan pengelolaan sumber daya alam telah memicu korban lebih banyak ketimbang konflik HAM lainnya.

Walhi pun, tandas Mukri, mendesak pemerintah segera menerbitkan instrumen turunan UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, seperti kajian lingkungan hidup strategis dan penyusunan dokumen amdal harus memasukkan perspektif kebencanaan dan HAM. "Ambang batas baku mutu limbah cair juga masih longgar." Data yang dihimpun Walhi sepanjang 2010 menunjukkan telah terjadi 79 kasus pencemaran yang mengakibatkan 65 sungai tercemar hebat. Hal lain yang disorot adalah masih minimnya daerah yang telah memiliki peraturan daerah (perda) tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW). "Baru tujuh provinsi yang mempunyai perda RTRW," lanjut Mukri.

Sebelumnya, wahana pecinta alam, yakni Wandari, Mapala UI, dan Vanaprastika, menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi hutan di Indonesia. "Kami meminta pemerintah segera melakukan moratorium atas segala bentuk aktivitas eksploitasi hutan oleh pemegang hak pengelolaan hutan maupun para pembalak liar," kata Ketua Umum Vanaprastha Adhyaksa Dault saat bertemu Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Selasa (11/1).

Adhyaksa mengatakan, 2 juta ha hutan musnah sedap tahun di Indonesia. Bahkan hutan di Pulau Jawa tinggal 0,4 juta ha.

